

**ALIENASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH
(STUDI: PENYERAHAN ASET PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI KE
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH).**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas*

OLEH:

IHWANUL IHZA

1910841001

Dosen pembimbing I : Muhammad Ichsan Kabullah, S.IP., M.AP

Dosen Pembimbing II: Drs.Yoserizal., M.SI



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2024

ABSTRAK

Ihwanul Ihza,1910841001, Alienasi Kebijakan Pembentukan Kota Sungai Penuh,Studi:Penyerahan Aset Kabupaten Kerinci ke Pemerintah Kota Sungai Penuh,Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Politik,Universitas Andalas, Padang,2023. Dibimbing oleh Dosen Pembimbing 1: Ichsan Kabullah,S.IP,M.PA. Dosen Pembimbing 2: Drs.Yoserizal,M.SI. Skripsi ini terdiri dari 142 halaman dengan referensi 6 buku 4 buku teori, 2 buku metode, 2 tesis, 6 skripsi, 6 jurnal, 1 peraturan Bupati, 1 Perundang-undangan, 1 Permendagri, 10 website internet.

Penelitian ini berangkat dari rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam penyelesaian penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Amanat UU No 25 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, didalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan secara jelas penyelesaian terkait penyerahan aset, 5 tahun paling lambat semenjak dilantiknya Wali Kota Sungai Penuh. Realita yang terjadi setelah dilantiknya Wali Kota Sungai Penuh pertama pada tahun 2009 sampai 2023 masih belum juga terselesaikan.

Didalam kajian kebijakan ilmuwan cenderung terjebak dalam analisis klasik implementasi dan evaluasi kebijakan, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memunculkan model alternatif untuk menganalisis masalah implementasi kebijakan. Pada penelitian ini, peneliti menganalisisnya dengan menggunakan teori alienasi kebijakan oleh Tummers yang terdiri dari dua variabel yaitu (*Powerlessness*) ketidakberdayaan dan (*Meaninglessness*) ketidakbermaknaaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Terdapat 15 informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Analisis data, hingga penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penyerahan aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh. Membuat Kabupaten Kerinci teralienasi hal tersebut berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan, peneliti melihat bahwa dalam pelaksanaan penyerahan aset antara Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh tidak terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya aturan yang mendiskriminasi Kabupaten Kerinci sehingga membuat permasalahan ini berkepanjangan bahkan sampai di Mahkamah Konstitusi kemudian tidak adanya aturan/system yang memadai, tidak adanya tenaga ahli,tidak adanya legal audit aset,tidak adanya anggaran pusat yang dikucurkan untuk Kabupaten Kerinci dan tidak adanya kepastian hukum. selain itu terjadinya keluhan masyarakat atas pelayanan yang tidak efisien dan kurangnya keterlibatan masyarakat dan ketransparan dalam penyerah aset Kabupaten Kerinci ke Kota Sungai Penuh.

Kata Kunci: Alienasi, Kebijakan, Penyerahan Aset, Pemerintah Kabupaten Kerinci, Pemerintah Kota Sungai Penuh.

ABSTRACT

Ihwanul Ihza, 1910841001, Alienation of Sungai Penuh City Formation Policy, Study: Handover of Kerinci Regency Assets to Sungai Full City Government, Department of Public Administration Science, Faculty of Socio-Political Sciences, Andalas University, Padang, 2023. Supervised by Lecturer 1: Ichsan Kabullah, S.IP.,M,PA Lecturer 2 : Drs.Yoserizal, M.SI. This thesis consist of 142 pages with references to the teory of 4 books, 2books method, a thesis, 6 thesis, 6 juornals, 1 Major regulations, 1 Legislations, 1 Minister of Home Affairs regulations and 10 internet website.

This research departs from the low commitment of the Kerinci Regency Government in completing the handover of assets of Kerinci Regency to Sungai Penuh City. The mandate of Law No. 25 of 2008 concerning the establishment of Sungai Penuh City, in the law has clearly explained the settlement related to the transfer of assets, 5 years at the latest since the inauguration of the Mayor of Sungai Penuh. The reality that occurred after the inauguration of the first Mayor of Sungai Penuh City in 2009 to 2023 has not yet been resolved.

In policy studies, scientists tend to get caught up in the classical analysis of policy implementation and evaluation, therefore this study aims to bring up alternative models to analyze policy implementation problems. In this study, researchers analyze it using the theory of policy alienation by Tummers which consists of two variables, namely Powerlessness and Meaninglessness. The research method used is descriptive qualitative method. Data collection techniques are carried out through interviews, documentation and observation. There were 15 informants selected through purposive sampling techniques. Data analysis, up to conclusions. Data validity using source triangulation.

The results of this study show that the policy of handing over assets of Kerinci Regency to Sungai Penuh City. Making Kerinci Regency alienated, this is seen from the variable of Powerlessness which consists of 3 indicators, namely strategic powerlessness, tactical helplessness, and operational helplessness then the variable of meaninglessness consisting of 2 indicators, namely the meaninglessness of actors and the meaninglessness of society. Based on the findings and analysis conducted, researchers saw that the implementation of asset handover between Kerinci Regency to Sungai Penuh City was not carried out properly. This is due to the existence of regulations that discriminate against Kerinci Regency, the absence of adequate rules/systems, the absence of experts, the absence of legal asset audits, the absence of a central budget disbursed to Kerinci Regency and the absence of legal certainty. In addition to the occurrence of community complaints over inefficient services and lack of community involvement and transparency in handing over Kerinci Regency to Sungai Penuh City

Keywords: Alienation, Budget, Asset handover, Kerinci district government, Sungai Penuh City government.